

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dilakukan supaya kegiatan berjalan dengan baik dan anggaran juga termasuk sangat diperlukan untuk digunakan di waktu yang akan datang. Anggaran sektor publik merupakan *instrument* akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik. Proses penganggaran sektor publik dimulai pada saat perumusan strategi dan juga pada saat perencanaan strategi selesai dilakukan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kementerian/Lembaga. Pemerintah harus membuat laporan keuangan atas anggaran yang telah diusulkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual. Laporan keuangan yang disusun yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kementerian/Lembaga Pemerintahan diharuskan untuk menyusun anggaran untuk suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dan diharuskan juga untuk menyusun laporan realisasi anggarannya pada akhir periode tahun anggaran. Laporan Realisasi Anggaran akan dianalisis dan digunakan untuk penilaian kinerja suatu lembaga atau instansi terhadap anggaran yang sudah dibuat dengan kegiatan pelaksanaannya. Oleh karena itu hasil dari informasi tersebut dapat menghasilkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Menurut Spardley (Sugiono, 2015:335) mengatakan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari suatu pola, selain itu analisis juga merupakan cara berfikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan dengan hubungannya terhadap keseluruhan. Menurut Munawir (2010:35), analisis laporan keuangan merupakan analisis laporan keuangan dimana laporan tersebut terdiri dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan dan tendensi ataupun kecenderungan (trend) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan.

Badan penanggulangan bencana daerah kabupaten bogor merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana alam di daerah kabupaten bogor. Badan penanggulangan bencana daerah kabupaten bogor pada tahun 2019 memiliki 9 program dengan total 50 kegiatan dan pada tahun 2020 memiliki 4 program dengan total 35 kegiatan. Program penanggulangan desa rawan bencana alam pada tahun 2019 dan program peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana alam pada tahun 2020 memiliki salah satu kegiatan yang dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

setiap tahunnya yaitu pembentukan dan penguatan desa tangguh bencana atau destana. Berdasarkan peraturan kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 desa/kelurahan tangguh bencana yaitu memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan.

Anggaran untuk kegiatan pembentukan dan penguatan desa tangguh bencana pada BPBD Kabupaten Bogor jumlahnya cukup besar dan juga realisasinya mengalami hal yang sama. Pada akhir periode tahun anggaran, badan penanggulangan bencana daerah kabupaten bogor akan menyusun laporan realisasi anggaran atas kegiatan pembentukan dan penguatan desa tangguh bencana. Periode tahun anggaran 2019 dan tahun 2020 terjadi kenaikan pagu anggarannya yang menyebabkan realisasinya pun mengalami hal yang sama. Adapun rincian pagu beserta realisasinya dapat dijelaskan pada table berikut ini :

Tabel 1 Anggaran dan Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 dan 2020

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
2019	Rp449.984.160	Rp447.820.000
2020	Rp451.826.800	Rp451.135.300

Sumber: BPBD Kabupaten Bogor

Menurut Kasmita (2013:69), terdapat dua macam metode untuk menganalisis laporan keuangan yang bisa digunakan , yaitu metode analisis secara vertikal (statis) dimana untuk menganalisisnya hanya dilakukan satu periode laporan keuangan saja. Metode analisis horizontal (dinamis) yaitu analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan dengan beberapa periode. Metode analisis vertikal meliputi teknik analisis presentase perkomponen, analisis rasio dan analisis impas. Sedangkan metode analisis horizontal meliputi teknik analisis perbandingan, analisis trend, analisis sumber dan penggunaan dana dan analisis perubahan kotor. Analisis yang akan dilakukan oleh penulis adalah analisis perbandingan. Analisis perbandingan yaitu dengan menyajikan laporan keuangan secara komparatif, contohnya dua atau tiga tahun atau lebih.

Berdasarkan uraian diatas, penulis memilih analisis perbandingan karena merupakan salah satu teknik analisis metode horizontal, karena yang akan penulis analisis yaitu realisasi anggaran atas kegiatan pembentukan dan penguatan desa tangguh bencana selama 2 tahun periode. Dari definisi tersebut, dalam metode analisis horizontal maka analisis perbandingan merupakan analisis yang sangat tepat untuk menganalisis realisasi anggaran atas kegiatan pembentukan dan penguatan desa tangguh bencana pada badan penanggulangan bencana daerah kabupaten bogor dengan judul “ Analisis Realisasi Anggaran atas Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Desa Tangguh Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis realisasi anggaran terhadap anggaran yang telah diusulkan.
2. Manakah diantara tahun 2019 dan tahun 2020 periode anggaran yang paling baik realisasinya.

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan tugas akhir ini adalah:

1. Menguraikan bagaimana menganalisis realisasi anggaran atas kegiatan pembentukan dan penguatan desa tangguh bencana pada BPBD Kabupaten Bogor.
2. Menguraikan periode anggaran yang paling baik realisasinya berdasarkan perhitungan analisis perbandingan dan analisis efektivitas periode tahun 2019 dan 2020.

1.4 Manfaat

Tugas akhir ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi, khususnya untuk akuntansi pemerintahan daerah dalam hal realisasi anggaran.
2. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat instansi
Dapat mengetahui analisis realisasi anggaran dengan menggunakan teknik analisis perbandingan pada periode anggaran tahun 2019 dan tahun 2020 dan dari hasil analisis tersebut instansi dapat mempertimbangkan perencanaan anggaran untuk tahun-tahun berikutnya agar dapat terealisasi 100% dan membuat peningkatan kinerja keuangan instansi.
 - b. Manfaat Akademisi
Sebagai perbandingan untuk peneliti lain yang mempunyai topik dan judul yang sama di masa yang akan datang nantinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.